



Target Periksa 15 Anggota DPR

Hasil Audit Hambalang Tahap II

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyerahkan audit investigatif tahap II terkait proyek Hambalang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada

Jumat (23/8) lalu. Namun, lembaga antirasuah itu belum membenarkan adanya 15 nama anggota DPR yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan sekolah olah-

raga di bukit Hambalang, Bogor.

Jubir KPK Johan Budi S.P mengatakan kalau pihaknya belum memiliki kesimpulan apapun terhadap laporan BPK. Sebab, hingga

kini lembaga antirasuah itu masih mempelajari laporan BPK. "Kami belum tahu 15 nama (anggota DPR) itu. Yang jelas, untuk penganggaran Hambalang pernah ada anggota DPR

yang kami panggil," katanya.

Seperti diketahui, dalam bocoran laporan BPK yang diterima pewarta,

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



Target Periksa 15 Anggota DPR

Sambungan dari halaman 1

menyebut ada 15 anggota DPR yang menandatangani persetujuan alokasi anggaran Hambalang. Mereka berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Disebutkan mereka menyetujui anggaran APBN Perubahan Kemenpora tahun anggaran 2010. Padahal, tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp 600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi X dan Kemenpora. Disamping itu, minus HA, AHN, dan MI mereka tandatangan untuk RAPBN Kemenpora TA 2011.

Meski demikian, lanjut Johan, bukan tidak mungkin 15 nama anggota DPR itu akan diperiksa KPK. Apalagi, kalau benar dalam laporan BPK yang diterima KPK menyebutkan peran para parlemen. "Kalau ada info proses yang melibatkan mereka dan selama diperlukan, mereka bisa saja kami periksa," terangnya. Saat disinggung soal audit kerugian Hambalang yang belum selesai, Johan menjawab KPK tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya tetap pasif menunggu BPK menyelesaikan tugasnya. Yang pasti, kebutuhan KPK saat ini adalah hasil kerugian negara, bukan sekedar audit investigatif. "Ketua BPK juga sudah bilang dalam proses finalisasi," katanya.

Terpisah, di Bakoel Koffie Ci-

kini, Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) menyampaikan sikapnya atas audit BPK. Mereka meminta agar ada transparansi laporan hasil audit investigasi hambalang tahap II. Alasan ketua BPK Hadi Poernomo yang menyebut UU KIP melarangnya membuka hasil audit dinilai mengada-ada.

Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Alamsyah Saragih justru menilai saat ini sering disalahgunakan. Digunakan untuk menutupi informasi bukan menjaga rahasia. "Kalau informasinya terus ditutup, bisa jadi kerugiannya makin besar. Ketua BPK dan DPR jangan bermain api di Hambalang," katanya. Menurutnya, benar jika BPK berlingung dibalik UU KIP kalau hanya menyerahkan resume ke DPR. Tidak demikian, saat menyerahkan data sepenuhnya ke parlemen. Kalau sudah demikian, Alamsyah Saragih menyebut data tersebut sudah milik publik. BPK tidak perlu lagi menutupi apa yang diserahkan ke DPR. Anggota Indonesia Budget Center, Roy Salam menambahkan ada baiknya DPR langsung membuka ke publik melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Selama data itu disimpan di Senayan, tidak salah jika publik menilai keputusan itu memperkeruh kasus Hambalang. Alasannya, di DPR terlalu banyak intrik politik. "Apa ada nama-nama baru

dalam audit itu yang menysasar ke anggota DPR lain?," tanya Roy. Dia menduga, DPR sengaja menutup informasi dari BPK demi kepentingan Pemilu 2014. Roy menuding anggota DPR khawatir partainya makin terlihat bobrok dan kadernya tidak lagu saat pemilihan legislatif.

Apalagi, sebelum ada data yang bocor kasus Hambalang selalu identik dengan Partai Demokrat. Nah, hasil audit BPK malah menyebut ada beberapa partai lain yang ternyata ikut bermain di Hambalang. "Jelas ini korupsi yang sistemik. Ada proses politik yang melibatkan para anggota DPR lain," tuturnya.

Beberapa rekomendasi dari KUAK, berharap hasil audit segera dibuka untuk publik. Penting untuk menghindari politisasi dan penghilangan informasi soal kasus Hambalang. BPK juga harus memperjelas posisi dalam pemberantasan korupsi, hasil audit harus jelas dan tidak mudah diberikan pada legislatif. Mereka khawatir, BPK diintervensi pihak tertentu.

Ketua BPK Hadi Poernomo sendiri meminta kepada masyarakat untuk bersabar. Saat ini pihaknya sedang berusaha menyelesaikan audit kerugian negara. Meski tidak menyebut kapan pastinya, dia meyakinkan tidak terlalu lama. "Mudah-mudahan tidak lama lagi. BPK tidak diintervensi siapapun," tegasnya. *(dim)*